



Rumah Pintar Pemilu Kampar dan Peningkatan Literasi Politik Peserta Didik Tingkat SMA

Olifvia Fajrin¹, Sri Erlinda^{2*}, Hariyanti³

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau, Indonesia
[*sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id](mailto:sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id)

Article Info

Article history:

Received December 8th, 2022

Revised December 15th, 2022

Accepted December 29th,
2022

Keywords:

Election Smart House
Political Literacy
Students
Kampar

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Kampar's Election Smart House (ESH) in increasing the political literacy of high school level students. This study used qualitative research methods. As for the data and data sources used in this study using primary data and secondary data. Primary data from this study came from the results of in-depth interviews with staffs at ESH Kampar and observations of the activities. This research was carried out because of the low level of political literacy of students. There are still many students who are apathetic, this is due to the low level of political literacy. The results of this research is Kampar's ESH played a role in increasing the political literacy of students at the high school level. Kampar's ESH provides education about democratic, electoral values, and other political values such as providing education about the state and power, Activities of political institutions of authority and their role trains expressing opinions, government regulations and public services, and involves students in activities politics. The limitations of this research is Kampar's ESH is doing political literacy in one state high school. Though there are 51 high school in this regency.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License. ©2022 by the author(s).



Corresponding Author:

Sri Erlinda

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Riau

sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mendidik warga negaranya yakni dengan hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP). RPP merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih dengan memanfaatkan ruang khusus untuk melakukan aktifitas pembelajaran bagi masyarakat tentang pemilu dan demokrasi. RPP menyajikan berbagai materi dalam rangka mendidik masyarakat khususnya pemilih pemula untuk menanamkan kesadaran pentingnya nilai-nilai demokrasi yang direalisasikan menggunakan hak pilihnya pada pemilu (Simbolon, 2019).

RPP dijalankan berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU No.220/KPU/2016 perihal fasilitasi pendidikan pemilih dan SE KPU No.339/KPU/VI/2016 tentang pengendalian program pembentukan RPP. Setiap provinsi, kabupaten ataupun kota yang memiliki RPP dapat mengayomi wilayahnya dengan ciri khas daerah masing-masing, serta dapat memasukkan budaya ataupun tradisi dalam mengedukasi masyarakat (KPU RI, 2017).

Dalam pedoman penyelenggaraan RPP dimaksudkan bahwa tujuan utama RPP adalah: (1) untuk menaikkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas; dan (2) menjadi sumber informasi tentang pemilu. Sementara adapun tujuan khusus yaitu memberi pelajaran dan materi kepada masyarakat akan pentingnya bahwa pemilu dan demokrasi dengan cara meningkatkan pengetahuan nilai dan fungsi demokrasi serta menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi. Layanan RPP diharapkan dapat meningkatkan literasi politik pemilih pemula. Literasi politik dipahami lebih luas dari hanya sekadar pengetahuan politik, melainkan cara membuat diri efektif dalam kehidupan politik.

Dalam buku pedoman RPP dijelaskan bahwa bentuk aktivitas pendidikan politik dilaksanakan dengan memanfaatkan empat ruang yaitu: (1) ruang audio visual; (2) ruang pameran/display alat peraga/informasi kepemiluan/demokrasi; (3) ruang diskusi; dan (4) ruang sosialisasi. Keempat ruangan tersebut memfasilitasi proses pembelajaran politik. Sebagai ilustrasi, ruang audio visual dimanfaatkan untuk menayangkan film-film yang menyangkut pemilu nasional dan pemilu lokal. Pendidikan politik tidak lain merupakan proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (KPU RI, 2017).

Pengembangan pendidikan politik dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan merupakan rangkaian upaya untuk membangkitkan dan memantapkan kesadaran masyarakat akan politik dan kenegaraan dalam rangka turut menjaga Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik nasional (Sutrisman, 2019; Damri, 2020). Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan bagian konseptual dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang berlangsung untuk membangun sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Pemasalahannya di era sekarang ini adalah pemahaman publik yang rendah tentang isu-isu politik. Hal ini mengakibatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi juga cenderung menurun (Sukri, 2020). Faktanya, penyelenggaraan pendidikan politik sangat ditentukan oleh interaksi pengalaman dengan kepribadian, lingkungan sosial, budaya dan situasi ekonomi seseorang. Tindakan politik individu berkembang, namun, tidak sedikit orang yang acuh tak acuh terhadap politik. Hal ini disebabkan karena komitmen palsu yang dilakukan oleh para pemimpin dan realitas politik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Di sisi lain, pemilih pemula sangat penting mendapat perhatian melalui peningkatan kecerdasan dan daya kritisnya sebagai pemilih. Hal ini membutuhkan pilihan-pilihan politik (*voting behavior*) yang rasional sehingga dapat berkontribusi positif pada hasil dan proses pemilu yang berkualitas (Sutisna, 2017). Dalam wawancara dengan 10 peserta didik pada tingkat SMA, 6 dari 10 peserta didik mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti isu-isu politik dan kurang tertarik terhadap isu tersebut. Mereka hanya mengetahui isu-isu yang sudah viral di media sosial namun tidak mengikuti kronologinya.

Dari sini dapat dilihat bahwa masih minimnya literasi politik peserta didik saat ini. Peserta didik diharuskan paham tentang literasi politik, terutama bagi peserta didik tingkat SMA yang akan menjadi pemilih pemula. Melalui literasi politik diharapkan akan membentuk perilaku peserta didik menjadi saling peduli, tidak saling menghina, tidak saling mengadu domba, dan tidak saling menuduh satu sama lain. Namun, jika tingkat literasi politik mereka rendah maka perilaku yang tercemar dalam sehari-hari akan menjadi buruk seperti bersikap apatis, saling mengolok-olok dan hal sikap buruk lainnya (Fernandes, 2022).

RPP Kampar merupakan ruang khusus untuk melakukan literasi politik yang didirikan pada tahun 2017. Namun, RPP Kampar memiliki tingkat kunjungan yang rendah, yaitu sebanyak 26 kali kunjungan dalam kurun waktu Januari-Juni 2022. Apabila dibandingkan dengan RPP di wilayah yang berdekatan, yaitu RPP Pekanbaru yang dikunjungi sebanyak 127 kali dalam kurun waktu yang sama. Sebagian besar pengunjung RPP Kampar ialah warga sekitar yang direkrut sebagai relawan. Anggota Relawan demokrasi RPP Kampar saat ini terdiri dari guru dan peserta didik. Hanya saja, kegiatan relawan demokrasi untuk saat ini belum berjalan secara maksimal.

Berbeda dengan hasil penelitian di RPP Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang memiliki cukup banyak relawan demokrasi. Relawan direkrut dari berbagai kelompok masyarakat yang kemudian disegmentasi sesuai dengan komunitasnya. Para relawan ini kemudian memberikan informasi ke pemilu dan demokrasi sesuai dengan segmentasi kelompoknya.

Sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk dikaji secara lebih mendalam. Artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana peran yang dilakukan RPP Kampar kepada remaja, khususnya yang berusia 16-18 tahun dalam rangka meningkatkan literasi politik mereka? Apakah kegiatan sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Kampar? Penelitian ini penting karena pemilih pemula masih belum berpengalaman dalam proses pemilihan umum, sehingga pemberian edukasi tentang nilai-nilai ke pemilu semenjak usia remaja menjadi langkah yang baik dalam sistem demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi dan aktivitas sosial masyarakat (Sujarweni, 2022). Dalam penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan tulisan yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, secara luas dan mendalam (Nugrahani, 2014; Moleong, 2013; Sudjana, 2005) tentang peran RPP Kampar dalam melakukan literasi politik.

Adapun data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berasal dari hasil wawancara mendalam dengan *staff* dan relawan di RPP Kampar. Peneliti juga melakukan observasi lapangan di RPP Kampar. Sementara data Sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku administrasi, brosur, media sosial dan laporan yang tersedia di

RPP Kampar. Kemudian data disajikan dalam bentuk deskripsi dan ditarik kesimpulan yang akan dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik demokrasi dan pendidikan politik memiliki hubungan yang aksiomatis. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor dalam sistem politik memberikan preposisi yang dapat menentukan pola pendidikan. Sehingga, pendidikan menjadi kondisi prasyarat dalam demokrasi untuk dapat memperkenalkan konsep heterogenitas dan multikultur (Rahman, 2018).

Tujuan didirikannya RPP adalah untuk menaikkan tingkat partisipasi pemilih, baik secara kuantitas maupun kualitas. Selan itu, RPP diharapkan dapat menjadi sumber informasi kepemiluan beserta hal politik lainnya (KPU RI, 2017). Kegiatan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi ke sekolah dan masyarakat yang berada di wilayah operasional RPP. RPP Kampar juga menyediakan panel dinding informasi secara manual dan digital seperti: *booklet, leaflet, flyer, video, film*, dsb. Materi dalam bentuk panel dinding informasi dibuat dengan desain yang menarik, ringkas dan memuat substansi materi yang akan ditampilkan. Namun karena tidak banyaknya kunjungan ke RPP Kampar semua media yang tersedia menjadi tidak berfungsi secara maksimal.

Langkah lain yang dilakukan oleh RPP Kampar dalam meningkatkan literasi politik adalah dengan memberikan edukasi mengenai nilai-nilai demokrasi. Edukasi dilakukan melalui kerjasama dengan SMAN 1 Bangkinang Kota. Namun sayangnya RPP Kampar pada tahun 2022 hanya memberikan edukasi ke satu sekolah dari 51 sekolah yang terdapat di Kabupaten Kampar. Hal ini mengakibatkan pendidikan politik menjadi tidak merata dan hanya menjadi sebatas formalitas dan pelaksanaan program saja. Padahal pemilih pemula menjadi segmen yang menarik untuk diedukasi karena mereka adalah kelompok yang belum menjadi pemilih namun telah dipersiapkan untuk menjadi pemilih terlebih dahulu (Hariyanti, 2022).

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat sosialisasi di SMAN 1 Bangkinang Kota pada tanggal 3 Agustus 2022, RPP Kampar banyak memberikan edukasi mengenai nilai-nilai kepemiluan. Di samping itu, materi tentang konsep negara dan kekuasaan tidak begitu ditonjolkan karena menurut *staff* RPP, materi tersebut sudah diberikan pada mata pelajaran PPKn. Materi lainnya adalah tentang kegiatan politik, institusi politik serta otoritas dan perannya. Namun juga tidak terlalu ditonjolkan karena menurut mereka, materi ini sudah menjadi satu rangkaian dengan nilai-nilai politik lainnya.

Gambar.1 Sosialisasi oleh RPP Kampar ke SMAN 1 Bangkinang Kota



Sumber: sosial media KPU Kampar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, meliputi demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup dan toleransi sosial dalam masyarakat, dinyatakan bahwa dunia pendidikan harus dapat memberikan wawasan politik agar generasi muda tidak apatis terhadap persoalan politik. RPP Kampar mengiringi kegiatan sosialisasi dengan kuis berhadiah dan juga diskusi langsung dengan para *staff* RPP Kampar. Peserta didik terlihat bersemangat dan mendengarkan materi dari pembicara. Kegiatan sosialisasi ini sejalan dengan indikator edukasi nilai-nilai kepelimuan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang urgensi pemilu dan demokrasi.

Setelah diadakan sosialisasi ini diharapkan para remaja dapat tertarik dengan isu politik dengan mengunjungi RPP. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan cukup baik karena angka partisipasi pengunjung RPP yang masih sangat sedikit. Rendahnya animo remaja sebagai pemilih pemula sudah menjadi *concern* oleh banyak pihak. Menurut (Masputri, M.E., Rafni, A., & Dewi, 2019) salah satu dasar prinsip politik ialah asas bertahap yang artinya diberikan secara berjenjang. Jika ingin melibatkan peserta didik harus diberikan sesuai dengan watak dan usia individu, agar pelaksanaannya bisa maksimal. Pemberian pendidikan politik juga harus dilakukan secara demokratis, persuasif dan tidak otoriter. Dengan menggunakan prinsip dasar pendidikan politik, diharapkan dapat memaksimalkan peserta didik ikut aktif dan terlibat dalam kegiatan politik.

Pemilih pemula ini menjadi medan perebutan suara dalam pemilu. Berdasarkan sisi kuantitas, pemilih pemula mencapai 20%. Mereka menjadi penentu ramai tidaknya rapat umum partai politik, yang pada level permukaan menjadi penting untuk publikasi dan mempengaruhi calon pemilih lainnya (Rafni, 2019). Pemilih pemula seringkali digambarkan melalui perilaku; labil, pengetahuan politik yang relatif rendah, didominasi oleh kelompok (*peer-group*), dan mencoblos hanya sekedar untuk menggugurkan haknya. Terdapat beberapa faktor penyebab turunnya angka partisipasi, diantaranya ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial (Hariyanti, H., & Hambali, 2021).

Melatih Peserta Didik Mengekspresikan Pendapat dalam Proses Politik

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartini, 2009). Pemilih pemula di Indonesia didominasi oleh pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan syarat umur warga negara boleh menyalurkan hak politiknya adalah telah berumur 17 tahun. Potensi besar pemilih pemula nampaknya telah menjadi perhatian banyak kalangan. Banyak partai politik yang telah menetapkan kalangan pelajar yang telah memiliki hak pilih sebagai target dukungan suara (Abdullah, 2017). Minimnya pengetahuan politik membuat pemilih pemula dianggap tidak dapat mengekspresikan pendapat mereka mengenai proses politik. Peserta didik hanya bisa menerima informasi secara mentah dan manut-manut dari apa yang mereka dapat.

Sementara itu, menurut (Affandi, 2015), literasi politik adalah pengertian tentang sebuah tahapan dan masalah politik, dan semua warga negara secara efektif menjalankan perannya (sebagai partisipan) yakni pengetahuan dan pemahaman kita sebagai warga negara. Literasi politik membuat masyarakat peduli terhadap isu-isu negara sendiri. Dalam hal ini berarti sangat penting peserta didik untuk mengekspresikan diri mereka terhadap nilai-nilai politik.

Berdasarkan hasil penelitian, peranan RPP Kamar dalam meningkatkan literasi politik dilakukan dengan melatih peserta didik dalam mengekspresikan pendapat pada proses politik. Dalam mengekspresikan pendapat mengenai hal politik sangatlah penting, karena para peserta didik merupakan aktor yang akan menjadi estafet penerus bangsa sekaligus *agent of change* dalam masyarakat.

RPP Kamar juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya institusi politik, otoritas dan perannya kepada peserta didik. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, pengetahuan tentang anggaran pembangunan, tidak terlalu dijelaskan. Selain itu, edukasi tentang aturan pemerintah, dan layanan publik juga tidak terlalu disinggung oleh *staff* RPP. Setelah dikonfirmasi, hal ini dikarenakan materi tersebut di luar konteks yang sudah direncanakan dan dianggap menjadi satu rangkaian dengan materi lainnya. Selain itu, materi ini juga tidak termasuk dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kegiatan RPP Kamar. Guru PPKn dan peserta didik tidak tahu apa alasan RPP Kamar tidak memberikan edukasi mengenai pengetahuan anggaran pembangunan, mereka hanya fokus pada materi yang diberikan saja.

Melibatkan Peserta Didik di dalam Kegiatan Politik

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Sesuai dengan paham demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi (Pattipeilohy, Victor Ringhard., Rofiaty, 2013). Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik yang mendukung sistem politik yang ideal dan bersamaan dengan itu lahirlah kebudayaan politik (Abdullah, 2017).

Berdasarkan informasi dari *staff* RPP Kamar, Bapak YK, menyatakan dalam meningkatkan literasi politik peserta didik, mereka merekrut relawan demokrasi. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan dalam demokrasi. Anggota relawan demokrasi berasal dari masyarakat dan peserta didik tingkat SMA yang dipilih oleh KPU dan RPP Kamar. Mereka menjalankan program-program KPU

dan RPP Kampar seperti sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dan pra-pemilih.

Namun, ketika ditanyakan kepada Guru PPKn dan peserta didik tingkat SMA mengatakan hal yang berbeda. Guru tersebut mengatakan bahwa belum ada peserta didik yang diikutsertakan dalam kegiatan politik, kecuali kegiatan pemilu seperti pemelihan umum dan pemilihan presiden pada tahun 2017. Untuk kegiatan pemilu itu pun hanya peserta didik yang sudah berumur 17 tahun ke atas, yang masih dibawah 17 tahun belum dapat ikut serta dalam kegiatan pemilu. Ketika pandemi terjadi pada tahun 2019-2021, banyak kegiatan yang kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan kondisi yang memaksa masyarakat untuk berkegiatan di rumah. Relawan demokrasipun terhenti di tengah jalan hingga tahun 2022 belum ada pembaruan.

KESIMPULAN

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa RPP Kampar memiliki peranan penting dalam meningkatkan literasi politik peserta didik, khususnya tingkat SMA yang dilaksanakan di SMAN 1 Bangkinang Kota. Literasi politik merupakan pemberian pengetahuan terhadap isu-isu politik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat menjadi lebih peduli terhadap isu perpolitikan di negaranya sendiri. RPP Kampar memberikan edukasi mengenai berbagai nilai dalam politik, seperti: nilai demokrasi, kepemiluan, negara dan kekuasaan, institusi politik dan otoritas negara. RPP Kampar juga melatih peserta didik dalam mengekspresikan pendapat, memberikan pengetahuan tentang aturan pemerintah dan layanan publik, serta melibatkan peserta didik dalam kegiatan politik melalui relawan politik. Namun pihak RPP Kampar tidak memberikan edukasi terhadap hal-hal yang dianggap sensitif untuk didiskusikan, seperti terkait anggaran pembangunan. Hal ini sangat disayangkan karena edukasi terkait materi ini sangat dibutuhkan dalam menciptakan transparansi pengelolaan negara oleh masyarakat. Adapun kekurangan dalam penelitian ini, bahwa RPP Kampar baru melaksanakan peranannya di satu sekolah saja. Adapun kekurangan dalam penelitian ini, bahwa RPP Kampar baru melaksanakan peranannya di satu sekolah saja. Padahal Kabupaten Kampar memiliki 51 SMA yang memiliki potensi pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. A. dan S. (2017). Meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran statistika berbasis pendidikan politik di lingkungan sekolah. *Jurnal Gantang*, 2(1), 1–9.
- Affandi, I., & Suryadi, K. (2015). Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. Diambil dari <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>.
- Damri, M. P., Putra, F. E., & Kom, M. I. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Faisal Bakti, Andi. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Fernandes, R. (2022). *Model Pembelajaran Connected to Political Education (CPE) dalam Pembelajaran Sosiologi untuk Meningkatkan Literasi Politik Pemilih Pemula* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Hariyanti, H., & Hambali, H. (2021). Identifikasi kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan Sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 1-11.
- Hariyanti, H., Hambali, H., Eddison, A., & Ariyanto, J. (2022). *Pre-voters' Political Education Activities at the Election Smart House amidst the Covid-19 Pandemic*. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 416-427.
- Hariyanti, H., & Sari, F.A. (2021). *Election Smart House (ESH) as a Pre-Voter Political Education Facility To improve the quality of democracy*. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, (6(1), 1-11.
- Kartini, K. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Keputusan KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tentang “Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- KPU RI. (2017). *Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Masputri, M.E., Rafni, A., & Dewi, S. . (2019). Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, 2(1), 67-75.
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Pattipeilohy, Victor Ringhard., Rofiaty, and M. S. I. (2013). The Influence of the availability of Money and Time, Fashion Involvement, Hedonic Consumption Tendency and Positive Emotions towards Impulse buying Behavior in Ambon City. *International Journal of Business and Behavioral Sciences*, 3(8), 36-49.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan meliputi demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, toleransi sosial dalam masyarakat.
- Rafni, A. S. (2019). Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu. *Journal Of Moral and Civic Education*, 3(1).
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 10, Vol (1), 44–51.
- Syahrin, M. A. (2020). Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan. *Eksekusi*, 2(2), 146-165.
- Simbolon, Y. Y. (2019). Jurnal Komunikasi dan Media. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(1), 16–32.
- Sudjana, N. 2005. *Metoda Penelitian*. Bandung: Bandung: Trasi.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169-190.
- Sutisna, A. (2017). Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 1, No.2.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.